e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol. 13 No. 01 2024, Hal 297-305
http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra, ISSN :2302-706

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Aditya Dwi Prasetyo[1*], Dwiyani Sudaryanti[2], Hariri[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang
*Email Korespondensi: dwia27704@gmail.com

ABSTRACT

Finding out how regional original revenue, capital spending, and balancing funds affect regional governments' financial performance is the main goal of this study. This study's sampling strategy is based on documenting relevant information in various forms (e.g., notes, books, transcripts, etc.). There were 38 samples used to analyst the secondary data that was acquired from the official BPK RI website. The procedure makes use of SPSS 26 to do multiple linear regression analysis. According to this study's findings, regional governments in East Java Province's districts and cities can improve their financial performance by increasing capital expenditures, decreasing local revenue, and increasing balancing funds.
Keywords: Regional Original Income, Capital Expenditure, Balancing Fund, Financial Performance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penting bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai alat untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi yang lebih besar di tingkat daerah dan berkurangnya ketergantungan pada pendanaan federal akan menghasilkan hasil keuangan yang lebih baik. (Anjani,Akram dan Handajani 2016).

Ketika masyarakat menyadari bahwa dana pajak mereka digunakan untuk gaji, bukan untuk layanan publik atau investasi yang memberikan kontribusi langsung terhadap tujuan pembangunan, mereka memberikan kesan negatif terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, penting untuk melacak seberapa baik kinerja pemerintah kota secara finansial.

Pendapatan, belanja, keuangan, sumber daya manusia, dan keadaan makroekonomi merupakan beberapa elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan dari retur, PAD yang sah, retribusi daerah, dan pajak merupakan contoh pendapatan daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan, tantangan penelitian adalah:

1. Apa pengaruh unsur pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah komponen perimbangan uang berdampak terhadap kinerja keuangan kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana jumlah uang yang dibelanjakan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur untuk proyek-proyek besar berdampak pada anggaran mereka?

Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel pendapatan asli daerah dengan kesehatan fiskal kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.
2. Secara khusus, kami ingin melihat bagaimana kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur terkait dengan unsur dana perimbangan.

3. Untuk menilai dampak belanja modal terhadap kesehatan fiskal kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur

Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Dengan tujuan untuk lebih memahami bagaimana Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur menggunakan laporan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang keuangan.
b. Kursus akuntansi sektor publik harus mengambil manfaat dari temuan penelitian ini.
c. Peneliti kedepannya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi.

2. Manfaat praktis

a. Untuk memaksimalkan efisiensi dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia, sektor publik dapat memasukkan temuan penelitian ini ke dalam penilaian kinerja fiskal pemerintah daerah.
b. Laporan audit keuangan pemerintah memberikan landasan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah, yang dapat digunakan pemerintah untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan dalam Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumsel" yang diterbitkan oleh Pratama Research pada tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pendapatan, positif dan signifikan. dipengaruhi oleh pengeluaran, tidak ada pengaruh dari pajak dan tidak ada pengaruh dari jumlah penduduk.

"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Makassar" menjadi subjek penelitian Tahir (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan besar, dana perimbangan berpengaruh negatif dan besar, dan belanja modal berpengaruh positif dan besar terhadap kinerja keuangan daerah.

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah" (Sukama, dkk., 2021). Belanja modal, besaran pemerintah daerah, pendapatan antar pemerintah, dan pendapatan asli daerah semuanya mempunyai dampak besar terhadap kinerja keuangan, menurut literatur ini.

Wulandari, Dkk (2022) dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan". Hasil penelitian ini menguatkan anggapan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, kabupaten dan kota memperoleh keuntungan finansial dari Pendapatan Asli Daerah yang sah sepenuhnya. Terdapat korelasi positif dan signifikan secara statistik antara keberhasilan keuangan pemerintah dan investasi modal serta belanja pegawai di sektor yang sama.

Kinerja Keuangan

Kapasitas pemerintah suatu daerah dalam menggunakan sumber daya keuangannya secara efektif untuk mendukung operasional sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah—semuanya tanpa hanya bergantung pada pendanaan federal—disebut kinerja keuangan daerah. domain yang terkandung dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Handoyo, 2018).

Pendapatan Asli Daerah

Segala pendapatan daerah yang bersumber dari dalam daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Halim (2014). Selain itu, kemungkinan masing-masing

sumber pendapatan asli daerah, serta keadaan perekonomian secara umum, menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belanja Modal

Pengeluaran pada aset tetap dan aset lainnya yang memiliki siklus manfaat-kembali yang berlanjut melampaui satu periode akuntansi disebut dengan belanja modal (2015:101) oleh Halim. Pengeluaran untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan infrastruktur adalah tujuan belanja modal bagi pemerintah kota.

Dana Perimbangan

Atmaja (2015) menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya desentralisasi, daerah mendapatkan uang perimbangan dari pendapatan APBN untuk digunakan untuk keperluannya sendiri.

Kerangka Konseptual

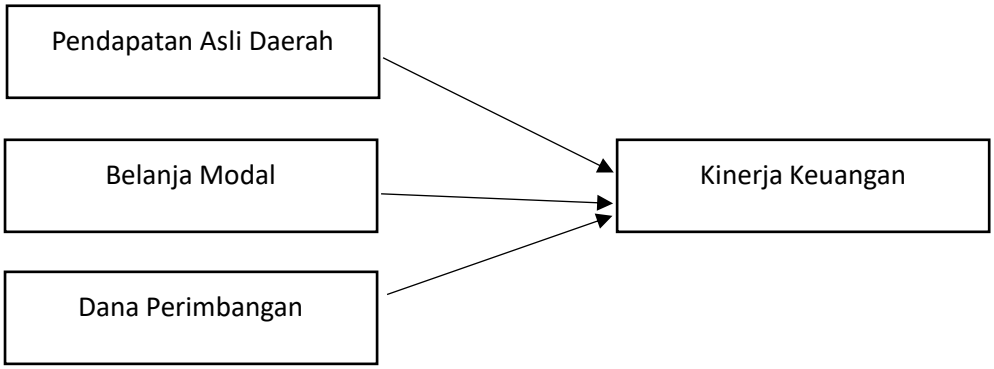

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

H1 : Kemampuan membayar pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: pendapatan asli, belanja modal, dan dana perimbangan.

H1a : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bersifat negatif dan signifikan secara statistik.

H1b : Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Dana Perimbangan.

H1c : Pemerintah di tingkat daerah dapat meningkatkan kinerja keuangannya melalui belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian korelasional yang mengambil pendekatan kuantitatif mencakup penelitian-penelitian seperti ini. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yang satu merupakan variabel bebas dan satu lagi merupakan variabel terikat, peneliti melakukan penelitian korelasional. Pada bulan Juni 2023 hingga Februari 2024, peneliti di Provinsi Jawa Timur mengunjungi beberapa daerah dan kota yang dijadikan lokasi penelitian.

Populasi dan Sampel

Informasi dari website Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia dijadikan sebagai populasi Laporan Hasil Pemeriksaan penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah LHP pada BPK RI Per 31 Desember tahun 2021 sehingga diperoleh data sebanyak 38 sampel.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Kemampuan suatu wilayah untuk memiliki dan menginvestasikan kekayaannya sendiri—yang dikenal sebagai "Pendapatan Asli Daerah"—dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan ekonomi, swasembada, dan devolusi dari pengawasan federal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi dasar pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Rumus

Pendapatan Asli Daerah berikut ini dapat digunakan menurut Mardianis dalam Muhyidin (2023):

$$PAD = \frac{\sum \text{Realisasi PAD}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Belanja Modal (X2)

Investasi pada aset tetap dan aset lainnya dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta biaya pemeliharaan agar tetap berjalan dengan baik dan menjadikannya lebih hemat biaya dan berkualitas lebih tinggi, dianggap sebagai belanja modal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). barang-barang. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan belanja modal, seperti yang dikemukakan oleh Ketut dkk dalam Muhyidin (2023):

$$BM = \frac{\sum \text{Belanja Modal}}{\sum \text{Realisasi Belanja Pemerintah Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Dana Perimbangan (X3)

Dalam rangka desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan uang APBN yang dapat menunjang operasional daerah, sesuai UU No. 33 Tahun 2004. Mencapai keseimbangan fiskal antara pemerintah federal dan negara bagian adalah tujuan desentralisasi. Peraturan perundang-undangan yang relevan mengklasifikasikan dana perimbangan menjadi tiga kategori: bagi hasil, alokasi umum, dan alokasi khusus. Rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung dana perimbangan, seperti yang diungkapkan Dasmar Taufik dkk dalam Muhyidin (2023):

$$DP = \frac{\sum \text{Dana Perimbangan}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Kinerja Keuangan (Y)

Pengukuran kinerja penting untuk akuntabilitas publik. Sederhananya, akuntabilitas tidak hanya mempertimbangkan seberapa baik pemerintah membelanjakan uang pajak, namun juga seberapa baik masyarakat secara keseluruhan membelanjakan uang tersebut. Rasio efisiensi digunakan untuk menilai metrik kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan melihat rasio pendapatan daerah terhadap belanja daerah. Sebagaimana dikemukakan Akhmad dalam Muhyidin (2023), rasio efisiensi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\sum \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\sum \text{Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data sekunder, antara lain laporan temuan pemeriksaan keuangan daerah di BPK RI, serta dokumen, informasi, dan statistik terkait, menjadi dasar penelitian ini. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menghitung data yang berkaitan dengan variabel penelitian merupakan proses pengumpulan data ini.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berbasis SPSS 26 sebagai metodologi analisisnya. Kehadiran suatu hubungan dan kepentingan relatif dari dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dipahami dengan lebih baik melalui analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	38	,760	1,053	,91558	,088158
Pendapatan Asli Daerah	38	,074	,639	,17716	,100734
Belanja Modal	38	,100	,377	,17837	,060631
Dana Perimbangan	38	,060	,752	,55955	,125353
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data diolah, 2023

Variabel yang valid berjumlah 38 buah, dengan jumlah N, berdasarkan uji statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 1. Sampel data kinerja keuangan (Y) mempunyai standar deviasi sebesar 0,088158 dan rata-rata sebesar 0,91558, dengan nilai yang berkisar dari 0,760 hingga 1,053. Standar deviasi sebesar 0,100734 dan rata-rata sebesar 0,17716 mencirikan nilai Pendapatan Asli Daerah (X1) yang berkisar antara 0,074 hingga 0,639. Dengan mean sebesar 0,17837 dan standar deviasi sebesar 0,060631 maka nilai belanja modal (X2) bervariasi antara 0,100 hingga 0,377. Nilai Dana Perimbangan (X3) berkisar antara 0,060 sampai dengan 0,752 dengan rata-rata sebesar 0,55955 dan standar deviasi sebesar 0,125353.

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06614559
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,052
	Negative	-,066
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data dioalah, 20203

Nilai Kolmogorov Smirnov mengikuti distribusi normal, sesuai dengan temuan uji normalitas pada tabel 2. Asymp Sig > 0,05.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1 PAD	,751	1,332
	X2 BELANJA MODAL	,929	1,077
	X3 DANA PERIMBANGAN	,713	1,403

Dependent Variable: Y KINERJA KEUANGAN
Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 3. Variabel yang ditentukan adalah sebagai berikut: 1) VIF Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,332 dengan toleransi sebesar 0,751; 2) VIF Belanja Modal adalah 1,077 dengan toleransi sebesar 0,929; dan 3) VIF Dana Perimbangan adalah 1,403 dengan toleransi sebesar 0,713. Temuan penelitian ini menunjukkan

bahwa variabel independen yang diteliti tidak menunjukkan indikasi multikolinearitas karena nilai VIF-nya di bawah 10 dan nilai toleransinya melebihi 0,1.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,009	,031		,293	,771
	PAD	-,045	,044	-,202	-1,021	,314
	Belanja Modal	,099	,061	,265	1,630	,112
	Dana Perimbangan	,038	,037	,211	1,037	,307

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: data diolah, 2023

Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah (0,314 > 0,05), variabel belanja modal (0,112 > 0,05), dan variabel dana perimbangan (0,307 > 0,05) seluruhnya disajikan pada tabel 4 hasil uji heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada variabel yang menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,604	,026		23,371	,000
	PAD	-,182	,065	-,208	-2,800	,008
	Belanja Modal	,884	,150	,608	5,884	,000
	Dana Perimbangan	,333	,066	,474	5,069	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: data diolah, 2023

Berikut cara membangun model menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan menggunakan data pada tabel 5:

$$Y = 0{,}604 - 0{,}182.PAD + 0{,}884.BM + 0{,}333.DP + e$$
$$(0{,}008) \quad (0{,}00) \quad (0{,}00)$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan

α : Konstanta

β1, β2, β3 : Koefisien Regresi

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Belanja Modal

X3 : Dana Perimbangan

e *: Error Term* (Variabel Pengganggu)

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,248	3	,083	72,084	,000[b]
	Residual	,039	34	,001		
	Total	,288	37			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD, Belanja Modal

sumber : data diolah, 2023

Hasil Uji Simultan pada tabel 6 menunjukkan nilai Fhitung sebesar 72,084, yang signifikan secara statistik pada 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, kami menerima H1 dan menolak H0. Oleh karena itu, dana perimbangan, belanja modal, dan pendapatan daerah semuanya mempunyai dampak terhadap variabel kinerja keuangan secara bersamaan.

2. Uji Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,930[a]	,864	,852	,033898

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: data diolah, 2023

Hasil uji koefisien determinasi Adjusted R2 disajikan pada Tabel 7. Terlihat bahwa faktor kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendapatan daerah, belanja modal, dan dana perimbangan, dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0,852 atau 85,2%. . Apa yang terjadi dengan persentase sisanya—14,8%, atau 100% dikurangi 85,2%—tergantung pada hal lain.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,604	,026		23,371	,000
	PAD	-,182	,065	-,208	-2,800	,008
	Belanja Modal	,884	,150	,608	5,884	,000
	Dana Perimbangan	,333	,066	,474	5,069	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 8 dapat dilihat bahwa:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

H1a kami terima dan H0 tolak karena nilai signifikansi 0,008 < 0,05 menunjukkan bahwa pendapatan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh variabel pendapatan awal di tingkat daerah.

Konsisten dengan penelitian lain, penelitian ini menemukan bahwa variabel pendapatan daerah merugikan kinerja keuangan (Pratham, 2017).

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kami menerima H1b dan menolak H0 karena nilai signifikansi dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan adalah 0,000 < 0,05. Terdapat korelasi positif antara kesuksesan finansial dengan variabel belanja modal.

Temuan penelitian bahwa faktor belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sejalan dengan penelitian Pratama (2017), Tahir (2019), Sukma dkk. (2021), dan Wulandari dkk. (2022).

3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja keuangan pemerintahan Daerah

Pengaruh saldo uang terhadap kinerja keuangan cukup besar, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Akibatnya H1c diterima sedangkan H0 ditolak. Akibatnya, pendapatan meningkat dengan dana perimbangan yang dapat diubah.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Sukma dkk. (2021) yang menemukan bahwa variabel dana perimbangan meningkatkan hasil keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil analisis data menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sementara itu, kinerja keuangan dipengaruhi oleh faktor pendapatan daerah, belanja modal, dan perimbangan keuangan.
2. Terdapat korelasi negatif antara keberhasilan finansial dengan variabel pendapatan asli daerah.
3. Kinerja keuangan dipengaruhi positif oleh variabel belanja modal.
4. Hasil keuangan ditingkatkan oleh variabel dana perimbangan.

Keterbatasan

Meskipun penelitian ini mengikuti semua protokol ilmiah standar, namun penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, seperti:

1. Meskipun banyak variabel lain yang mungkin berperan dalam menentukan kinerja keuangan, hanya pendapatan daerah, belanja modal, dan perimbangan uang yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Hanya pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang disurvei untuk penelitian ini.
3. Indikator efisiensi menjadi satu-satunya subjek penelitian ini.
4. Penelitian ini hanya menggunakan data tindak lanjut satu tahun.

Saran

Berikut ini adalah beberapa bahan penilaian yang mungkin peneliti berikan berdasarkan penyelidikan yang telah selesai dan temuannya:

1. Diharapkan, faktor-faktor lain termasuk ukuran pemerintah, ukuran legislatif, biaya operasional, dan surplus anggaran keuangan akan dimasukkan dalam penelitian selanjutnya.
2. Saya dapat meningkatkan ukuran sampel.
3. Dapat menerima penggunaan metode lain dalam mengevaluasi kinerja keuangan variabel dependen
4. Dapat meningkatkan durasi pengamatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Ajani, Eka Sintala Dewi, Akram, dan LilikHandajani. 2016. "Hubungan PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat." InFrestasi (Universitas Trunojoyo) 11 (1): 21-40.

Handoyo, E. T. (2018). Pengarh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovermmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Knerja Keuangan . Doctoral Dissertaton, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Muhyidin. 2023. Pengaruh Opini Audit BPK, Intergovernmental Revenue, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021. *Skripsi*, Universitas Islam Malang.

Atmaja, S. (2015). Efek Berganda Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. *Buletin Bumi SKK, 31*(November), 24

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. jakarta: Salemba Empat.